

PENURUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA TAHUN 2022

Novianto Murti Hantoro

1

Abstrak

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini cukup drastis dan menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai tanggapan pengamat dan pemerintah serta upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan ke depan. Beberapa pengamat menyatakan turunnya skor IPK Indonesia menunjukkan strategi pemberantasan korupsi kurang efektif. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Penindakan terus akan dilakukan tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemberantasan korupsi memerlukan kontribusi dan sinergi dari semua pihak. DPR RI melalui fungsi legislasi memiliki peran penting dengan melahirkan undang-undang yang sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu mengawasi implementasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang transparan dan akuntabel secara nasional.

Pendahuluan

Transparency International meluncurkan hasil *Corruption Perception Index (CPI)* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk tahun pengukuran 2022. Hasilnya, IPK Indonesia mengalami penurunan skor 4 poin, dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022 dan berada pada peringkat 96 pada tahun 2021 menjadi 110 pada tahun 2022 dari 180 negara yang disurvei. Penurunan skor 4 poin ini merupakan penurunan paling

drastis sejak tahun 1995. Capaian skor tersebut sama dengan capaian tahun 2014. Skor IPK Indonesia saat ini masih jauh di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik, yaitu 45 dan Indonesia menduduki peringkat 7 dari 11 negara di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand (voaindonesia.com, 1 Februari 2023).

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu *chapter* Transparency International, sebuah jaringan global



non-Governmental Organization (NGO) antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Sumber

data dan hasil indikator penilaian IPK Indonesia pada tahun 2022 dengan perbandingan tahun 2021 dapat dilihat dalam gambar berikut:

| SOURCE DATA | 2022 | | 2021 |
|--|------|---|------|
| 1. PRS International Country Risk Guide | 35 | ↓ | 48 |
| 2. Global Insight Country Risk Ratings | 47 | ↔ | 47 |
| 3. IMD World Competitiveness Yearbook | 39 | ↓ | 44 |
| 4. Economist Intelligence Unit Country Ratings | 37 | ↔ | 37 |
| 5. Bertelsmann Foundation Transform Index | 33 | ↔ | 33 |
| 6. PERC Asia Risk Guide | 29 | ↓ | 32 |
| 7. World Justice Project - Rule of Law Index | 24 | ↑ | 23 |
| 8. Varieties of Democracy Project | 24 | ↑ | 22 |

Sumber: Presentasi Transparency Internasional Indonesia, 31 Januari 2023.

Gambar 1. Sumber Data CPI 2022 dan Perbandingan dengan 2021

Berdasarkan delapan sumber tersebut, tiga sumber data mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu Political Risk Service (PRS) yang merosot 13 poin, *IMD World Competitiveness Yearbook* yang turun 5 poin, dan *PERC Asia* yang turun sebesar 3 poin. Tiga sumber data stagnan, yakni *Global Insight*, *Bertelsmann Transformation Index*, dan *Economist Intelligence Unit*. Dua sumber data mengalami kenaikan satu dan dua poin, yakni *World Justice Project - Rule of Law Index* dan *Varieties of Democracy Project*. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan pengamat dan pemerintah terkait penurunan hasil IPK Indonesia 2022 dan bagaimana upaya perbaikannya.

Tanggapan Pengamat dan Pemerintah

Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J. Danang Widoyoko, menurunnya

skor CPI Indonesia secara drastis pada tahun 2022 membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi tidak efektif (kompas.com, 1 Februari 2023). Revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis seperti digitalisasi pelayanan publik, bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan, namun merosotnya skor CPI menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan (republika.co.id, 1 Februari 2023).

Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, menilai upaya pemerintah mencegah korupsi melalui digitalisasi pengurusan administrasi merupakan upaya positif yang harus didukung,

namun upaya tersebut hanya berdampak pada korupsi skala kecil (*petty corruption*), misalnya suap dalam pengurusan dokumen. Padahal, problem mendasar di Indonesia adalah terjadinya korupsi politik, khususnya terkait penyusunan regulasi yang mengakomodasi kejahatan korupsi atau ketidakadilan secara luas. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan digitalisasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menempuh pembenahan struktural terkait aspek formal perundang-undangan. Hal tersebut berarti proses pembuatan undang-undang harus transparan, akuntabel, serta melibatkan publik (Kompas, 6 Februari 2023).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, berpandangan penurunan IPK Indonesia membuktikan kegagalan arah politik hukum pemberantasan korupsi. Kegagalan itu karena tidak kunjung disahkannya sejumlah rancangan undang-undang yang penting untuk pemberantasan korupsi, seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal. Sebaliknya, yang justru disahkan produk perundang-undangan yang kontroversial, seperti UU Cipta Kerja, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, serta revisi UU KPK. Totok Dwi Diantoro, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), mengatakan bahwa penurunan IPK menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi (nasional.tempo.co, 6 Februari 2023).

Dalam keterangan pers setelah melakukan rapat terbatas dengan Menkopolkam Mahfud MD, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam hal penindakan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum juga telah melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi seperti kasus Asabri dan Jiwaseraya. Presiden mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih (youtube.com, Sekretariat Presiden, 7 Februari 2023).

Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan, antara lain Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Negara Hukum, dan *Global Competitiveness Index*. Presiden mendorong agar RUU tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dapat segera diselesaikan dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya. Presiden juga menyampaikan keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Presiden menegaskan kembali bahwa tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi (youtube.com, Sekretariat Presiden, 7 Februari 2023).

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi telah ditunjukkan, misalnya dengan membuat mal-mal pelayanan publik dan pengurusan perizinan yang dilakukan secara digital, sehingga menutup peluang korupsi yang muncul saat pengurusan secara langsung. Pemerintah juga membuat semacam penanganan di birokrasi, seperti adanya zona integritas dan wilayah bebas korupsi (Kompas, 6 Februari 2023). Sementara menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, penurunan IPK Indonesia bukan disebabkan oleh penegakan hukum dalam bidang korupsi yang naik, namun disebabkan oleh masalah birokrasi perizinan yang mempersulit investasi. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempercepat proses perizinan (tempo.co, 6 Februari 2023).

Upaya Perbaikan

Hasil survei, apalagi terkait dengan persepsi, memang memiliki bobot yang kurang kuat dibandingkan dengan data dan fakta. Namun demikian, sikap Presiden Joko Widodo patut dipuji karena tetap memperhatikan hasil survei ini dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan. Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk menyikapi penurunan IPK Indonesia tersebut.

Untuk memperbaiki IPK pada tahun ini, tentunya perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan, khususnya pada poin-poin yang merosot tajam, yaitu hasil dari *PRS International Country Risk Guide* yang merosot 13 poin, *IMD World Competitiveness Yearbook* yang turun 5 poin, dan *PERC Asia Risk Guide* yang turun sebesar 3 poin. Dalam paparannya, Transparency International Indonesia menyerukan kepada

pemerintah untuk memprioritaskan komitmen anti-korupsi, memperkuat *check and balances*, menegakkan hak atas informasi dan membatasi pengaruh swasta untuk akhirnya membersihkan dunia dari korupsi serta ketidakstabilan yang ditimbulkannya. Transparency International Indonesia sebenarnya juga telah menyampaikan tiga rekomendasi, yaitu: 1. Politik dan Pemilu Berintegritas. Presiden dan Pemerintah, DPR dan partai politik, lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu, serta lembaga penegakan hukum harus menjamin prinsip integritas dan antikorupsi. 2. Kebijakan Ekonomi Antikorupsi. Pemerintah bersama pihak swasta harus konsisten dalam membangun sistem antikorupsi. 3. Demokrasi dan Ruang Sipil. Pemerintah harus menjamin kebebasan sipil dan ruang aspirasi publik dalam pembentukan regulasi hingga implementasi pembangunan (riset.ti.or.id, 31 Januari 2023).

Titik rawan selain agenda politik menjelang Pemilu 2024 adalah pemberlakuan Perppu Cipta Kerja. Tujuan dari Perppu ini memang mempercepat proses perizinan dengan kecenderungan melakukan resentralisasi kebijakan. Namun, perlu diteliti lebih lanjut pada tahap implementasinya apakah proses perizinan benar-benar menjadi jauh lebih mudah dan bebas dari korupsi. Konflik kepentingan berpeluang untuk menumbuhkan korupsi. Jenis korupsi suap, gratifikasi hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha masih lazim terjadi. Pada aspek penegakan hukum, masih terlihat belum efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, terlebih dengan masih ditemukannya praktik

korupsi di lembaga penegakan hukum.

Agenda pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama dari hulu sampai dengan hilir sehingga memerlukan komitmen dari semua pihak, bukan hanya dari aspek penindakan oleh aparat penegak hukum. DPR RI sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang juga memiliki peran penting, terutama dengan melahirkan undang-undang yang mampu mencegah terjadinya korupsi. Keterangan pers yang disampaikan Presiden untuk mendorong agar RUU tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dapat diselesaikan perlu direspons oleh DPR RI. Selain itu, DPR RI juga perlu mengevaluasi beberapa undang-undang yang kiranya pada tahap implementasi tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Dalam fungsi pengawasan, DPR RI juga perlu mengawasi bagaimana implementasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang transparan dan akuntabel dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

Penutup

Penurunan IPK Indonesia pada tahun 2022 mendapat tanggapan dari pengamat dan pemerintah. Beberapa pengamat menyatakan turunnya IPK tahun 2022 menunjukkan strategi pemberantasan korupsi kurang efektif. Presiden menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Presiden juga meminta aparat

penegak hukum untuk melakukan penindakan tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.

Untuk memperbaiki IPK pada tahun ini, perlu diperbaiki poin-poin yang merosot tajam, yaitu *PRS International Country Risk Guide*, *IMD World Competitiveness Yearbook*, dan *PERC Asia Risk Guide*. Rekomendasi TI-Indonesia terkait Politik dan Pemilu Berintegritas, Kebijakan Ekonomi Antikorupsi, dan Demokrasi dan Ruang Sipil juga perlu diperhatikan. DPR RI sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang memiliki peran penting dengan melahirkan undang-undang yang sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu mengawasi implementasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang transparan dan akuntabel dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

Referensi

- “4 Komentar Tokoh Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok”, 6 Februari 2023, <https://nasionaltempo.co/read/1688068/4-komentar-tokoh-soal-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-yang-jeblok>, diakses 7 Februari 2023.
- “Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif”, 1 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/17270081/indeks-korupsi-indonesia-melorot-strategi-pencegahan-dinilai-tak-efektif>, diakses 6 Februari 2023.
- “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Mengalami Penurunan Terburuk Sepanjang Sejarah Reformasi”, 31 Januari 2023, <https://riset.ti.or.id/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang->

- sejarah-reformasi/, diakses 6 Februari 2023,
- “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Terburuk Sejak Reformasi”, 1 Februari 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-menurun-terburuk-sejak-reformasi/6942025.html>, diakses 6 Februari 2023.
- “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bagaimana dengan Negara Lain”, 1 Februari 2023, <https://www.republika.co.id/berita/rpe4fi335/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-bagaimana-negara-lain>, diakses 6 Februari 2023.
- “LIVE: Keterangan Pers Presiden RI”, Istana Merdeka, 7 Februari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=T614a-8vxMY>, diakses 8 Februari 2023.
- “Peluncuran Hasil Persepsi Indeks Korupsi 2022, Korupsi, Konflik dan Keamanan”, 31 Januari 2023, <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/01/20230130-Presentasi-CPI-2022.pdf>, diakses 6 Februari 2023.
- “Perkuat Lembaga Pengawas untuk Tekan Korupsi Politik” 5 Februari 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/05/perkuat-lembaga-pengawas-untuk-tekan-korupsi-politik>, diakses 7 Februari 2023, diakses 6 Februari 2023.
- Problem Korupsi Politik Belum juga Teratasi”, *Kompas*, 6 Februari 2023, hal. 3.
- “Presiden Pastikan Pemberantasan Korupsi Tidak Surut”, *Media Indonesia*, 8 Februari 2023, hal. 4.



Novianto Murti Hantoro
novianto.hantoro@dpr.go.id

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1995 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan di Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” (2020); “Konsep *Omnibus Law* dan Tantangan Penerapannya di Indonesia” (2020); “Kinerja Pembentukan Undang-Undang Periode Pemerintahan 2014-2019: Evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional” (2019); dan “Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak” (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.